

Mahfud: Hoaks Politik dan Konten Negatif di Medsos Akan Meningkatkan Jelang Pemilu

Menko Polhukam Mahfud MD hari ini memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan the 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM) di Melbourne, Australia. Pada pertemuan tersebut, Mahfud menekankan antara lain, tingginya potensi ancaman misinformasi dan disinformasi terhadap kohesi sosial dan demokrasi di Indonesia. Bagi Indonesia, isu ini sangat penting untuk ditangani mengingat Indonesia akan menghadapi pemilu serentak untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan anggota parlemen pada 14 Februari 2024, ujar Mahfud dalam rilis Kemenko Polhukam, Selasa (12/3). Di pertemuan itu, Indonesia dan Australia mengakui keduanya menghadapi tantangan yang sama dalam isu ini dan membuka upaya kerja sama untuk menghadapinya. Mahfud menjelaskan misinformasi dan disinformasi berpotensi menimbulkan instabilitas, gangguan keamanan, dan bahkan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah Indonesia mengantisipasi ancaman tersebut. Bentuk misinformasi dan disinformasi yang menyebar adalah hoaks, fake news, dan kecenderungan click bait yang menyesatkan. Sementara itu, Mendagri dan Menteri Keamanan Siber Australia Clare O'Neil, mengungkapkan misinformasi dan disinformasi menjadi perhatian terutama karena adanya ancaman pengaruh asing dalam pemilihan umum di Australia. Keamanan siber juga merupakan isu yang menjadi keprihatinan bersama. Baik Indonesia dan Australia, mengalami serangan siber dan kebocoran data. Kedua negara bertekad mengatasinya, termasuk dengan meningkatkan kerja sama bilateral, bertukar pengalaman, dan praktik baik. Mahfud menjelaskan pemerintah berupaya mengurangi dampak hoaks dan ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui platform media sosial dan percakapan instan. Upaya itu ditujukan untuk meminimalisasi dan menghindarkan konflik sebagai akibat tindakan kekerasan yang dipicu oleh informasi hoaks. Ada tiga langkah yaitu: melalui penegakan hukum, melibatkan penyelenggara platform digital, dan peningkatan edukasi dan literasi digital masyarakat untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap misinformasi. Indonesia memandang penting kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas dalam

penanggulangan ancaman misinformasi dan disinformasi yang menjadi perhatian bersama, ujar Mahfud. Dalam konteks Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia telah mengajukan proposal penyusunan pedoman melawan berita palsu dan disinformasi di media bagi aparaturnya kepada Sekretariat ASEAN. Diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan bagi negara anggota ASEAN dalam mengembangkan panduan atau strategi penanganan hoaks di negara masing-masing. Mengingat kepentingan kedua negara kita yang cukup tinggi terhadap isu ini, saya kira kedua negara kita dapat berkolaborasi lebih lanjut dan melaksanakan program praktis seperti yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara ASEAN tersebut, pungkas Mahfud.